

## IMPLEMENTASI ASET TAK BERWUJUD PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) Tbk

**Amrie Firmansyah**

Politeknik Keuangan Negara STAN  
Email : amrie.firmansyah@gmail.com

**Annisa Kurnia Sari**

Politeknik Keuangan Negara STAN  
Email : annisa.sari26@gmail.com

**Yasmin Putri Maharani**

Politeknik Keuangan Negara STAN  
Email : yasminputrim@gmail.com

### ABSTRACT

*Intangible assets are nonmonetary assets that can be identified without physical form. Presentation of intangible assets in companies in Indonesia is specifically regulated in PSAK 19 (revised 2015). This study aims to review the presentation of intangible assets at PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. The selection of this company as the object of research is based on the entity is one of the largest telecommunications companies in Indonesia. In addition, the characteristics of this company has several types of intangible assets. The method used in this research is content analysis that is extracting information presented in the PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Financial Statements 2018. This study concludes that PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk has presented intangible assets according to existing criteria in PSAK 19 (2015 revision).*

*Keywords: Financial Statements, Intangible Assets, PSAK 19.*

### 1. PENDAHULUAN

Sektor telekomunikasi memiliki peran yang tinggi dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Di Tahun 2019, Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (BPS, 2020). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor informasi dan komunikasi. Hal ini dipicu seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai macam produk jasa telekomunikasi mulai bermunculan sehingga banyak perusahaan bersaing ketat untuk mendapatkan kinerja yang optimal. Perusahaan mengelola input produksi menjadi output yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri di sektor ini memerlukan berbagai macam sumber daya untuk mendukung bisnisnya.

Perkembangan di sektor ini cukup dinamis, mengingat kemajuan teknologi saat ini sangat pesat. Teknologi memudahkan aktivitas manusia dalam berkomunikasi dan bertukar informasi. Perkembangan tersebut mampu menghemat biaya pemakaian bagi konsumen. Di sisi lain, perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan lainnya dengan tetap memperhitungkan risiko dari setiap keputusan yang diambil. Selain itu, keterlibatan Pemerintah perlu untuk ikut mendorong pertumbuhan industri digital dan menstimulasi digitalisasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi, melalui Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI), terus mengupayakan pemerataan akses telekomunikasi dan membangun infrastruktur untuk mendukung konektivitas internet agar dapat dimanfaatkan di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) termasuk

di daerah-daerah perbatasan Indonesia (Setu, 2019).

Terdapat 11 perusahaan telekomunikasi di Indonesia, yaitu PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Bakrie Telecom Tbk, Elang Mahkota Teknologi Tbk, XL Axiata Tbk, Smartfren Telecom Tbk, Inti Bangun Sejahtera Tbk, Indosat Tbk, Inovisi Infracom Tbk, Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ([www.daftarperusahaan.com](http://www.daftarperusahaan.com)). Perusahaan telekomunikasi yang dianggap sebagai pemimpin pasar di Indonesia yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom). Telkom merupakan perusahaan yang menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan. Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan sebesar 52,09% oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 47,91% oleh Publik. Perusahaan yang berdiri sejak 19 November 1991 ini telah memiliki sebanyak 163 juta pelanggan seluler.

Prospek usaha Telkom ke depan memiliki banyak peluang yang memungkinkan perusahaan untuk dapat terus tumbuh di masa mendatang ([www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)). Dengan jaringan infrastruktur terluas berbasis teknologi serat optik dan beragam fasilitas pendukung, Perusahaan berada di posisi terdepan untuk menyediakan layanan konektivitas data beserta konten yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan permintaannya terus meningkat. Selain itu, Telkom juga memiliki posisi yang kuat dalam melayani tren digitalisasi proses bisnis di kalangan perusahaan baik besar maupun kecil dalam rangka meningkatkan efisiensi atau mengembangkan bisnisnya. Era digital semakin memberikan pengaruh yang nyata, ditandai

dengan munculnya banyak inovasi untuk menghasilkan berbagai solusi digital yang berkualitas di masyarakat yang disertai dengan pengalaman terbaik para pelanggan yang menggunakannya. Kondisi tersebut mendorong semakin tingginya adopsi digital untuk seluruh segmen pelanggan dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal layanan, secara berkelanjutan Telkom memperkuat dan mengembangkan layanan-layanan digital sesuai kebutuhan pelanggan sekaligus meningkatkan daya saing bisnis. Untuk mendukung layanan-layanan tersebut, Telkom terus memperkuat infrastruktur digitalnya dan mengembangkan berbagai platform dan aplikasi sebagai sarana solusi dan layanan digital.

Selanjutnya, Telkom terus menerus melakukan pengembangan *digital touch point*, personalisasi layanan melalui pemanfaatan *customer insight* dan *data analytic* serta penyederhanaan proses untuk memberikan pengalaman digital terbaik bagi seluruh pelanggan ([www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)). Berbagai inovasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan bisnis, Telkom memerlukan peran dari aset tak berwujud yang tinggi. Investasi pada aset tak berwujud ini tentunya memiliki risiko yang berbeda dari aset lain karena membutuhkan penilaian khusus dan biaya awal yang tinggi.

Penelitian yang mengulas aset tak berwujud telah dilakukan dalam beberapa literatur sebelumnya. Mawikere & Tinangon (2016) mengulas implementasi perlakuan akuntansi aset tak berwujud pada perusahaan penyedia tour and travel sebagaimana ISAK 14 (2010). Hartanto & Firmansyah (2019) mengulas penerapan implementasi kapitalisasi aset tak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan rintisan sebagaimana Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Sementara itu, pengujian

atas aset tak berwujud sebagai variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dalam beberapa penelitian. Rosdini (2016) melakukan pengujian relevansi nilai dari aset tak berwujud, Susanti et al. (2017), Imaningati & Sari (2015), Setijawan menguji aset tak berwujud terhadap nilai perusahaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengulas penerapan akuntansi atas aktiva tak berwujud pada perusahaan terbuka di Indonesia yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek laporan keuangan satu perusahaan untuk memberikan analisis secara komprehensif atas penerapan akuntansi aset tak berwujud berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu literatur dalam ulasan praktek akuntansi aset tak berwujud yang diterapkan oleh perusahaan sebagaimana standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Aset tak berwujud merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik sebagaimana diatur dalam (PSAK) 19 (IAI, 2015). Suatu aset dikatakan dapat diidentifikasi jika dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas yang dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau laibilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau aset yang timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat diaihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Aset keuangan, hak penambangan mineral, minyak,

dan gas alam dikecualikan dari kategori aset tak berwujud. Sementara itu, menurut IAS 38 (2014), aset tak berwujud merupakan item non-moneter yang dapat diidentifikasi, tanpa substansi fisik, yang berada dalam kendali aset entitas dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas. Rosdini (2016) menyatakan bahwa aset tak berwujud merupakan pusat kesenjangan informasi yang timbul dari aktivitas perusahaan yang bersifat melihat ke depan (*forward looking*) dan aktivitas ekonomi yang bersifat tidak pasti.

Terdapat enam jenis aset tak berwujud menurut Kieso et al. (2017), yaitu *marketing-related intangible assets*, *customer-related intangible assets*, *artistic-related intangible assets*, *contract-related intangible assets*, *technology-related intangible assets*, dan *goodwill*. *Marketing-related intangible assets* adalah aset tak berwujud yang terkait dengan pemasaran atau promosi produk atau jasa, seperti trademarks atau *trade names*, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian nonkompetitif. Bentuk aset tak berwujud yang kedua adalah *customer-related intangible assets*, yang berhubungan dengan interaksi suatu entitas dengan para pelanggan. Contoh aset jenis ini adalah daftar pelanggan, pesanan atau *backlogs* produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun nonkontraktual. Ketiga, *artistic-related intangible assets* atau aset tak berwujud yang terkait dengan kesenian, yang mencakup hak cipta atas drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, video dan materi audio visual lainnya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu yang memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Hak

cipta diberikan selama umur pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Keempat, *contract-related intangible assets* atau aset tak berwujud yang berkaitan dengan perjanjian kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang dapat berlaku antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu Hak dan kewajiban yang tercakup dalam kontrak dapat memiliki nilai tidak berwujud dalam kombinasi bisnis. Dokumen kontrak atau perjanjian lisan itu sendiri bukan aset tak berwujud, namun hak dan kewajiban hukum kontrak yang merupakan aset tak berwujud. Contoh dari aset tak berwujud yang berkaitan dengan perjanjian kontrak adalah *franchise (or license)*, izin konstruksi, hak siaran, dan kontrak jasa atau pasokan. Kelima, *technology-related intangible assets* yang merupakan aset tak berwujud yang terkait dengan inovasi dan kemajuan teknologi, seperti paten atas suatu penemuan teknologi. Paten memberikan hak kepada pemegang hak eksklusif untuk menggunakan selama jangka waktu 20 tahun tanpa campur tangan atau pelanggaran oleh pihak lain. Bentuk aset tak berwujud yang keenam adalah *goodwill*. *Goodwill* menggambarkan manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan dari asset lain yang diperoleh dari penggabungan usaha yang tidak dapat diidentifikasi secara individu dan diakui secara terpisah. *Goodwill* ini timbul terjadi saat pembelian atas perusahaan lain, dengan harga pasar aset bersih (nilai buku).

Pengakuan aset tak berwujud perlu menunjukkan bahwa aset tersebut memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan. Aset tak berwujud harus diakui jika, dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut

dapat diukur secara andal sebagaimana diatur dalam PSAK 19 (IAI, 2015). Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan.

Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk (impor), dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, setelah dikurangkan diskon dan rabat, dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Biaya yang dapat dikaitkan langsung adalah biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dengan sehingga aset siap digunakan; biaya profesional yang muncul secara langsung untuk membawa aset ke kondisi kerja (siap digunakan); dan biaya untuk menguji apakah aset tersebut dapat berfungsi dengan baik. Contoh dari pengeluaran yang tidak termasuk biaya aset tak berwujud adalah biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan kegiatan promosi), biaya memindahkan usaha ketempat atau ke tingkat konsumen baru (termasuk biaya pelatihan pegawai), dan biaya administrasi dan overhead lainnya.

Setelah mengakui biaya perolehan aset, entitas dapat menilai aset dengan menggunakan metode biaya yaitu dengan mengurangkan biaya perolehan tersebut dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai atau menggunakan metode revaluasi yaitu dengan cara menilai aset tak berwujud pada nilai pasar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian

penurunan nilai. Apabila entitas mencatat nilai aset tak berwujud dengan metode revaluasi, maka nilai wajar harus ditentukan dengan menggunakan referensi dari sebuah pasar aktif. Jika aset tak berwujud tidak memiliki pasar aktif maka harus dicatat sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Amortisasi sebenarnya memiliki konsep yang sama dengan penyusutan aset tetap. Amortisasi merupakan alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari suatu aset tak berwujud selama masa manfaatnya. Layaknya penyusutan, amortisasi tidak menyebabkan adanya arus kas yang keluar. Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode tersebut meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Pada umumnya akan sulit ditemukan bukti yang mendukung suatu metode amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi lebih rendah daripada akumulasi amortisasi berdasarkan metode garis lurus. Nilai yang dapat diamortisasi atas suatu aset dengan masa manfaat terbatas ditentukan setelah mengurangi nilai residunya. Nilai residu yang tidak sama dengan nol memberikan implikasi bahwa perusahaan berharap untuk melepaskan aset tak berwujud tersebut sebelum masa ekonomisnya berakhir. Estimasi nilai residu suatu aset didasarkan pada jumlah terpulihkan dari pelepasan menggunakan harga yang terungkap

pada tanggal estimasi penjualan aset serupa yang telah mencapai akhir masa manfaatnya dan telah beroperasi sesuai dengan kondisi serupa dengan aset yang akan digunakan. Suatu aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak boleh diamortisasi.

Pada saat tertentu, aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila sedang dalam (proses) pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan suatu aset tak berwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan (jika ada) dan nilai wajar aset. Hal tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Pelepasan suatu aset tak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai cara (contohnya, melalui penjualan, melalui sewa pembiayaan, atau disumbangkan).

Kieso et al. (2017) memaparkan terkait penyajian aset tak berwujud dan pos lain yang berhubungan dicatat pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan semua aset tak berwujud selain *goodwill* dilaporkan secara terpisah, dan *goodwill* diungkapkan sebagai pos terpisah. Hal ini dikarenakan *goodwill* merupakan bentuk yang berbeda dari jenis aset tak berwujud lainnya. Beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai aset tak berwujud sebagai bagian dari operasi berjalan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Kemudian seluruh informasi mengenai aset tak berwujud yang diakuisisi, beban amortisasi keseluruhan, perubahan jumlah catatan *goodwill* selama periode berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Suatu entitas harus mengungkapkan beberapa hal untuk setiap kelas aset tak berwujud, dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Pertama, apakah masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya. Kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Keempat, unsur-unsur dalam laporan pendapat komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Kelima, pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan yang secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal, yang diperoleh secara terpisah atau melalui kombinasi bisnis.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Metode analisis isi merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pembahasan secara mendalam melalui informasi yang terdapat dari suatu media massa. Analisis isi merupakan sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan media internal. Konten yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Pemilihan perusahaan ini sebagai obyek penelitian karena entitas tersebut merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi dan memiliki beberapa jenis aset tak berwujud, serta memiliki beberapa bentuk kombinasi bisnis. Item-item yang digunakan

dalam penelitian dalam Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 adalah identifikasi aset tak berwujud, pengungkapan masa manfaat dari aset tak berwujud, metode amortisasi, dan kesesuaiannya dengan PSAK 19 (IAI, 2015).

### 4. PEMBAHASAN

Penyajian aset tak berwujud masih menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena sifat aset ini unik dan cenderung sulit untuk dilakukan penilaian dan disajikan serta tingkat subyektifitas yang tinggi. Perusahaan perlu menyajikan aset tak berwujud secara akurat agar dapat digunakan oleh investor bagi pengambilan keputusan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis terhadap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan tujuan untuk menemukan kesesuaian penyajian aset tak berwujud pada PT Telkom dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 1 (IAI, 2016) dan PSAK 19 (IAI, 2015). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) pengungkapan jumlah aset tak berwujud dan *goodwill* secara terpisah pada Laporan Posisi Keuangan (PSAK 1); (2) pengungkapan mengenai umur manfaat dari aset tak berwujud, terbatas atau tidak terbatas secara tertulis (PSAK 19); (3) pengungkapan mengenai metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas (PSAK 19); (4) pengungkapan jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai) pada awal dan akhir periode. (PSAK 19); (5) pengujian atas penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas maupun tidak terbatas (PSAK 19).

Pada Laporan Posisi Keuangan perusahaan tahun 2018, terdapat aset tak berwujud-setelah

dikurangi akumulasi amortisasi pada pos aset tidak lancar. Aset tak berwujud tersebut pada tahun 2018 berjumlah sebesar 5.032 miliar rupiah, mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 42,55%. Namun, *goodwill* tidak dilaporkan secara terpisah dengan aset tak berwujud lainnya. Besaran aset tak berwujud pada CaLK sebesar 5.032 miliar rupiah tersebut terdiri dari *goodwill* sebesar 1.037 miliar rupiah dan aset tak berwujud selain *goodwill* sebesar 3.995 miliar rupiah. Hal ini berarti perusahaan tidak memenuhi kriteria pertama dalam penyajian aset tak berwujud dan *goodwill* terpisah pada laporan keuangan.

Adapun estimasi masa manfaat aset tak berwujud perusahaan dilaporkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud PT Telekomunikasi Indonesia**

Jenis Aset	Masa Manfaat (Tahun)
Piranti Lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset tak berwujud lainnya	1-30

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Telkom

Dalam pengungkapan tersebut hanya terdapat aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Pengungkapan ini diperlukan untuk menentukan besaran amortisasi tiap tahun. Sesuai dengan ketentuan PSAK 19 (IAI, 2015), setiap perusahaan seharusnya mengungkapkan adanya perubahan atas penentuan masa manfaat bagi aset tak berwujud. Kriteria umur manfaat dari aset tak berwujud menjadi terbatas dan tidak terbatas.

Tidak ada lagi pembatasan mengenai umur manfaat aset maksimal selama 20 tahun. Umur manfaat aset tak berwujud tidak terbatas apabila tidak diketahui batas waktunya pada saat pengkajian, namun umurnya menjadi terbatas dapat terjadi di masa yang akan datang. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada estimasi akuntansi dan juga adanya indikasi penurunan nilai. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan telah memenuhi kriteria terkait pengungkapan masa manfaat dari aset tak berwujud.

Sesuai dengan PSAK 19 revisi (IAI, 2015), perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Dalam laporan keuangan perusahaan hanya terdapat aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas termasuk metode amortisasi yang diterapkan. Kebijakan amortisasi yang dijalankan oleh perusahaan terhadap aset tak berwujudnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan selama masa estimasi masa manfaat dari aset tak berwujud. Oleh karena itu, ketentuan ini telah dilaksanakan oleh perusahaan.

Selanjutnya, rincian aset tak berwujud perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan tahun 2018 dan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Penyajian Aset Tak Berwujud Tahun 2018**

(miliar rupiah)

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2018	680	8.387	84	635	9.786
Penambahan	-	2.328	14	19	2.361
Akuisisi	422	1	2	-	425
Pengurangan	-	(51)	(11)	-	(62)
Reklasifikasi/translasi	(36)	15	5	33	17
Saldo, 31 Desember 2018	1.066	10.680	94	687	12.527
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2018	(29)	(5.714)	(71)	(442)	(6.256)
Beban amortisasi	-	(1.226)	(9)	(49)	(1.284)
Pengurangan	-	51	4	-	55
Reklasifikasi/translasi	-	(7)	(5)	2	(10)
Saldo, 31 Desember 2018	(29)	(6.896)	(81)	(489)	(7.495)
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>1.037</b>	<b>3.784</b>	<b>13</b>	<b>198</b>	<b>5.032</b>

Berdasarkan rincian tersebut, aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan terdiri dari *goodwill*, piranti lunak, lisensi, dan aset tak berwujud lainnya. Dengan komposisi terbesar berada pada piranti lunak yaitu sebesar 75,2% dari total aset tak berwujud. Beban amortisasi pada aset tidak berwujud diakui sebagai bagian dari “penyusutan dan amortisasi” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Dalam catatan atas laporan

keuangan perusahaan juga dijelaskan sisa periode amortisasi dari aset tak berwujud piranti lunak adalah 1-5 tahun. *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma (2008), Admedika (2010), data center BDM (2012), Contact Centres Australia Pty.Ltd. (2014), MNDG (2015), Melon (2016), GSDm (2016), TSGN (2017), Nutech (2017), Swadharma (2018), CIP (2018), dan Telin Malaysia (2018).

Tabel 4.4 Penyajian Aset Tak Berwujud Tahun 2017

(miliar rupiah)

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 1 Januari 2017	449	7.222	75	607	8.353
Penambahan	-	1.289	3	21	1.313
Akuisisi	232	4	-	-	236
Pengurangan	(3)	(122)	-	(11)	(136)
Reklasifikasi/translasi	2	(6)	6	18	20
Saldo, 31 Desember 2017	680	8.387	84	635	9.786
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 1 Januari 2017	(29)	(4.776)	(56)	(403)	(5.264)
Beban amortisasi	-	(1.037)	(9)	(48)	(1.094)
Pengurangan	-	95	-	11	106
Reklasifikasi/translasi	-	4	(6)	(2)	(4)
Saldo, 31 Desember 2018	(29)	(5.714)	(71)	(442)	(6.256)
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>651</b>	<b>2.673</b>	<b>13</b>	<b>193</b>	<b>3.530</b>

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Telkom

Selanjutnya, dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan telah menampilkan kebijakan pengujian atas penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas maupun tidak terbatas sesuai dengan standar yang berlaku baik dengan masa manfaat terbatas dan masa manfaat tidak terbatas setiap tahunnya.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan yaitu pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai adanya indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, perusahaan menentukan jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Apabila tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual,



maka perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas (UPK) dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan dari suatu aset baik aset individual maupun (UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Berdasarkan ulasan dalam pembahasan diketahui bahwa aset tak berwujud pada PT Telkom memiliki porsi 2,4% dari total aset yang dimiliki. Sebagian besar asset tersebut terdiri dari piranti lunak dengan porsi 75% dari total aset tak berwujud. Perusahaan telah menyajikan aset tak berwujud sesuai dengan kriteria yang ada dalam PSAK 1 (2016) dan PSAK 19 (2015). Dari 5 kriteria yang diulas dalam penelitian ini, 4 kriteria telah terpenuhi, namun penyajian aset tak berwujud dan *goodwill* secara terpisah pada laporan keuangan masih belum terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang memiliki tingkat subyektifitas berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti berdasarkan data dan informasi laporan keuangan yang tersedia dari manajemen. Untuk penelitian selanjutnya, selain menggunakan analisis isi dapat menambahkan menggunakan metode lain seperti melakukan wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan ulasan yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya, dapat menggunakan objek perusahaan lainnya untuk membandingkan ulasan atas aset tak berwujud dengan hasil dalam penelitian ini. Selanjutnya, PT

Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebaiknya memenuhi satu kriteria dalam pemisahan penyajian aset tak berwujud dan *goodwill* agar memenuhi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 19 (2015).

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2020), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019. *Berita Resmi Statistik*, 17(02), 1-12.
- Hartanto, L., & Firmansyah, A. (2019). Kapitalisasi aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal oleh start up company. *Jurnal Info Artha*, 3(1), 29-41
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.19 (Revisi 2010). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2013). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Imaningati, S., & Sari, N. (2015). Pengaruh *goodwill*, *research and development*, dan *intellectual capital* terhadap nilai pasar perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 6(2), 108-121.
- International Accounting Standar Board. (2014). International Accounting Standard 38 (amendment version), Intangible Assets.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Intermediate Accounting IFRS Edition 3rd Edition*. United Sates of America: Wiley.
- Mawikere, F. K., & Tinangon, J. J. (2016). Analisis penerapan ISAK no 14 tahun 2010 tentang aset tidak berwujud-biaya website pada PT Bunaken Surya Wisata Tour and Travel. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1000-1007

Rosdini, D. (2016). Relevansi nilai aset tak berwujud. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 65 – 85.

Setijawan, I. (2011). Pengaruh aset tidak berwujud terhadap nilai perusahaan. *Aset*, 13(2), 139-154.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/17878/siaran-pers-no-78hmkominfo042019-tentang-bts-dan-internet-bakti-kominfo-perkuat-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan-di-wilayah-3t/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/17878/siaran-pers-no-78hmkominfo042019-tentang-bts-dan-internet-bakti-kominfo-perkuat-akses-layanan-pendidikan-dan-kesehatan-di-wilayah-3t/0/siaran_pers). diakses 16 Januari 2020.

Susanti, P. E., Diatmika, I. P. G., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh aset tidak berwujud dan biaya penelitian dan pengembangan terhadap nilai pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1-9.

<https://www.daftarperusahaan.com/bidang/telekomunikasi> diakses tanggal 7 Januari 2020

[www.idx.com](http://www.idx.com) diakses 11 januari 2020.

[https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1590589094071\\_AR%20Telkom%202019\\_I\\_NDO\\_FINAL.pdf](https://www.telkom.co.id/data/lampiran/1590589094071_AR%20Telkom%202019_I_NDO_FINAL.pdf) diunduh tanggal 19 Januari 2020.

